

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebelum berlakunya Undang – Undang Dasar Tahun 1945 sekarang ini, hukum dasar tertulis yang berlaku di Indonesia sempat berganti beberapa kali. Pada kurun waktu 1945 – 1950 Undang – Undang Dasar Tahun 1945 tidak bisa dilaksanakan secara penuh dikarenakan Indonesia masih disibukkan untuk mempertahankan kemerdekaan, maka dari itu semua perundang – undangan yang berlaku pada masa Undang – Undang Dasar Tahun 1945 pertama diambil alih oleh Konstitusi Republik Indonesia Serikat ditambah dengan peraturan – peraturan yang dibuat pada masa ini. Dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949, istilah negara hukum disebutkan secara tegas, baik Dalam Alinea ke – 4 Mukaddimah maupun dalam Batang Tubuhnya. Demikian pula halnya dalam Undang – Undang Dasar Sementara Republik Indonesia No. 7 Tahun 1950, semua peraturan perundang – undangan yang berlaku pada masa Konstitusi Republik Indonesia Serikat diambil alih oleh Undang – Undang Dasar Sementara 1950 beserta dengan semua peraturan perundang – undangan yang dibuat pada masa ini.

Semua konstitusi yang pernah berlaku di Negara Republik Indonesia secara resmi mencantumkan demokrasi sebagai salah satu asas kenegaraannya. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat di

simpulkan bahwa pengertian negara hukum berkaitan dengan pengertian demokratis sehingga diperoleh rumusan negara hukum yang demokratis. Namun apa yang terjadi di lapangan sangatlah berbeda. Maka dari itu Undang Dasar Sementara 1950 diambil alih kembali oleh Undang – Undang Dasar Tahun 1945 untuk kedua kalinya dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno yang salah satu isinya adalah memberlakukan kembali Undang – Undang Dasar Tahun 1945 sebagai undang – undang dasar, menggantikan Undang – Undang Dasar Sementara 1950 yang berlaku pada waktu itu.

Dengan berlakunya kembali Undang – Undang Dasar Tahun 1945 yang dirasa banyak kelemahan dalam perumusannya, maka MPR RI pada kurun waktu 1999 – 2002 telah melakukan perubahan atau amandemen pada Undang – Undang Dasar Tahun 1945 sebanyak empat kali. Tujuan dilakukannya amandemen adalah untuk menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal – hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa.

Melalui perubahan beberapa kali, maka perubahan ketiga pada Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dari hasil Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2001 tanggal 1–9 November 2001 menegaskan bahwa bentuk dari negara Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala

warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya tanpa terkecuali. Hukum merupakan suatu bentuk upaya yang kemudian berbentuk tatanan yang mencerminkan kehendak dari segenap masyarakat untuk mencapai suatu keadaan yang ideal. Dengan adanya upaya tersebut, maka munculah pengaturan. Pengaturan dalam hal ini diharapkan dapat menciptakan ketertiban dalam masyarakat sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Hukum hadir untuk membimbing objek pada keadaan yang diinginkan oleh para pembuat hukum.

Sebagaimana kita telah ketahui, peraturan – peraturan hukum tertulis yang berlaku di Indonesia sebagian besarnya telah dikodifikasi berdasarkan hukum yang berlaku di Belanda. Tujuan dilaksanakannya kodifikasi untuk menghindari kekosongan dalam hukum, maka dari itu Indonesia mengadakan peraturan – peraturan peralihan dalam beberapa Undang – Undang Dasar yang telah dan sedang berlaku pada masa itu. Salah satu bentuk dari diberlakukannya asas konkordasi adalah Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia yang telah dikodifikasi pada tahun 1918. Hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan umum yang memiliki implikasi secara langsung pada masyarakat secara luas, dimana apabila suatu tindak pidana dilakukan, berdampak buruk terhadap keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan ketertiban umum di masyarakat.¹

Dikaji dari perspektif Sistem Peradilan Pidana, Indonesia mengenal lima institusi yang merupakan sub sistem peradilan pidana. Terminologi lima

¹ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Bunga Ketiga*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994, hlm. 84-85

institusi tersebut dikenal sebagai *Panca Wangsa* penegak hukum yang terdiri dari Kepolisian (Undang – Undang No. 2 Tahun 2002), Kejaksaan (Undang – Undang No. 16 Tahun 2004), Pengadilan (Undang – Undang No. 8 Tahun 2004), Lembaga Pemasyarakatan (Undang – Undang No. 12 Tahun 1995), dan Advokat (Undang – Undang No. 18 Tahun 2003).²

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum memiliki peran yang sangat penting dan vital. Peran Kejaksaan dalam era kemerdekaan secara yuridis dimulai sejak diundangkannya Undang – Undang No. 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Kejaksaan. Pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, semua ketentuan yang berlaku pada masa sebelumnya, dinyatakan masih berlaku. Demikian juga dengan undang-undang yang mengatur tentang lembaga penuntutan. Penegasan atas kedudukan dan peran serta fungsi lembaga penuntutan ditegaskan di dalam Undang – Undang No. 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Kejaksaan. Undang – Undang tersebut menyatakan bahwa Kejaksaan adalah alat negara penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut umum, penyelenggaraan tugas departemen Kejaksaan dilakukan Menteri atau Jaksa Agung.³

Undang – Undang No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menempatkan Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kewenangan negara dalam bidang penuntutan. Kedudukan

² Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik, Dan Permasalahannya*. Alumni, 2007.

³ Sekapur Sirih Satu Dasawarsa Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI Menuju Kejaksaan Yang Lebih Baik

tersebut membawa Kejaksaan sebagai lembaga penuntutan dalam posisi yang dilematis. Sebagai pelaksana kewenangan negara dalam bidang penuntutan, maka visi dan misi kejaksaan seharusnya mengacu pada visi dan misi negara sebagaimana tercantum di dalam Undang – Undang Dasar 1945. Penggantian Undang – Undang No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjadi Undang – Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI didorong oleh adanya semangat reformasi, salah satunya adalah penegakan hukum yang adil dan independen. Salah satu perubahan penting di dalam Undang – Undang Kejaksaan adalah adanya jaminan kemerdekaan lembaga Kejaksaan dalam melaksanakan fungsinya sebagai penuntut umum.⁴

Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara bertugas untuk menyelenggarakan fungsi Intelijen bidang penegakan hukum. Maka kedudukan Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia adalah sebagai penyelenggara intelijen negara yang merupakan bagian integral dari sistem keamanan nasional yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan fungsi dan kegiatan Intelijen Negara. Intelijen Negara sendiri berperan untuk melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan nasional dengan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan.

⁴ Ibid

Intelijen Kejaksaan adalah satuan unit kerja di lingkungan Kejaksaan Republik yang melaksanakan kegiatan dan operasi intelijen dari aspek penegakan hukum, serta kegiatan di bidang penerangan dan penyuluhan hukum. Segala informasi yang masuk ke Kejaksaan akan masuk ke bagian Intelijen terlebih dahulu, dan oleh pihak Intelijen akan di telaah apakah informasi yang diterima perlu ditindak lanjuti atau tidak karena hal ini berhubungan dengan fungsi Intelijen sebagai bank data dan informasi. Setiap data dan informasi mengenai ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hukum serta pertahanan dan keamanan.

Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan dalam bidang intelijen di daerah hukumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 994, huruf E dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Seksi Intelijen menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengadministrasian, pengendalian dan pelaporan pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain di daerah hukumnya berdasarkan prinsip koordinasi. Dukungan intelijen dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 1 ayat 14 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER- 037/A/J.A/9/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia:

“Dukungan intelijen adalah bantuan yang diberikan bidang intelijen Kejaksaan dalam rangka mendukung keberhasilan tugas pokok bidang Pembinaan, Pidana Umum, Pidana Khusus, Pengawasan, Perdata dan Tata Usaha Negara serta Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia.”

Salah satu bentuk dukungan intelijen yang diberikan oleh Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Batu adalah operasi intelijen yang terdiri dari penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Dalam kurun waktu tahun 2017 hingga 2019 bidang Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Batu menangani 471 perkara. 467 termasuk perkara biasa dan 4 termasuk perkara penting yang mendapatkan dukungan dari bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Batu atas dasar nota dinas Kepala Seksi Pidana Umum dan inisiatif dari bidang Intelijen. Selama pemberian dukungan kepada perkara tersebut, tindakan penyelidikan dan penggalangan tidak dilaksanakan. Penyelidikan sebagai langkah awal berfungsi untuk mencari informasi yang diperlukan untuk membuat perkiraan mengenai masalah yang dihadapi, dan penggalangan digunakan untuk membuat, menciptakan dan/atau suatu kondisi masyarakat di daerah tertentu. Penggalangan adalah semua usaha, kegiatan, pekerjaan dan tindakan yang dilakukan secara berencana, bertahap dan berkelanjutan dengan menggunakan taktik dan teknik intelijen untuk membuat, menciptakan dan/atau merubah suatu kondisi dan situasi di daerah tertentu atau mengkondisikan potensi masyarakat dalam jangka waktu tertentu kepada tingkat keadaan yang menguntungkan. Operasi Intelijen terkait perkara penting lebih menitikberatkan kepada pengamanan yakni segala usaha, pekerjaan, kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencegah, dan menangkal serta menemukan jejak, menggagalkan usaha – usaha, pekerjaan dan kegiatan pihak lain atau oposisi dalam melakukan sabotase, spionase atau pencurian bahan keterangan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis terdorong untuk menulis skripsi dengan judul **“PERAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM PEMBERIAN DUKUNGAN PADA BIDANG PIDANA UMUM TERKAIT PENANGANAN PERKARA PENTING (STUDI KASUS: KEJAKSAAN NEGERI KOTA BATU).”**

B. Rumusan Masalah

Dengan demikian, dapat dirumuskan yang menjadi pokok permasalahan didalam skripsi ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Batu dalam pengamanan perkara penting di bidang pidana umum?
2. Apa saja hambatan yang dialami oleh Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Batu dalam memberikan pengamanan perkara penting di bidang pidana umum?
3. Apa saja upaya yang dilakukan oleh Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Batu untuk mengatasi hambatan tersebut?

C. Tujuan

Selaras dengan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Batu dalam memberikan dukungan kepada bidang pidana umum terkait penanganan perkara penting.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dialami oleh Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Batu dalam memberikan dukungan dalam penanganan

perkara penting di bidang pidana umum dan upaya untuk menanggulangi hambatan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih berupa ilmu pengetahuan dan pemikiran dalam bidang hukum mengenai peran intelijen kejaksaan dalam pemberian dukungan kepada bidang lain, salah satunya kepada bidang pidana umum dalam penanganan perkara penting.
2. Dapat memberikan gambaran dan pengetahuan yang jelas kepada pembaca mengenai bentuk dukungan intelijen kepada bidang pidana umum terkait perkara penting.
3. Dapat memberikan pengetahuan mengenai batasan pemberian dukungan intelijen kejaksaan kepada bidang pidana umum dalam penanganan perkara penting.

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

Sebagai salah satu cara menambah pengetahuan dalam hal permasalahan yang diteliti dan syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang.

2. Bagi Kejaksaan

Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Batu dalam hal

memberikan dukungan kepada bidang Pidana Umum terkait penanganan perkara penting.

3. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pemberian dukungan intelijen kejaksaan kepada bidang pidana umum dalam penanganan perkara penting.

F. Originalitas

No.	Judul	Tahun	Penulis	Rumusan Masalah
1.	Fungsi Intelijen Keksaan Republik Indonesia dalam Perspektif Penegakan Hukum di Indonesia	2018	Firdaus Dewilmar	1. Hakikat pengaturan intelijen kejaksaan republik indonesia sebagai intelijen penegakan hukum 2. Model intelijen kejaksaan republik indonesia sebagai intelijen penegakan hukum dalam penegakan hukum.
2.	Kewenangan Intelijen Keksaan Negeri	2017	Rizal Juliawan	1. Bagaimana kewenangan Intelejen Kejaksaan

	<p>Sumedang dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara</p>			<p>Negeri Sumedang dalam memproses dugaan perkara tindak pidana korupsi,</p> <p>2. Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh Intelejen Kejaksaan Negeri Sumedang dalam memproses dugaan perkara tindak pidana korupsi.</p> <p>3. Upaya yang harus dilakukan oleh Intelejen Kejaksaan Negeri Sumedang dalam memproses dugaan perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2011</p>
--	--	--	--	--

				Tentang Intelejen Negara
3.	<p>Analisis Peran Intelijen Kejaksaan dalam Pelacakan Aset (<i>Asset Tracing</i>) Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Penegakan Hukum</p>	2015	Subhan Gunawan	<p>1. Bagaimanakah peran Intelijen Kejaksaan dalam pelacakan aset (<i>asset tracing</i>) pelaku tindak pidana korupsi dalam penegakan hukum?</p> <p>2. Mengapa terjadi hambatan pelaksanaan peran Intelijen Kejaksaan dalam pelacakan aset (<i>asset tracing</i>) pelaku tindak pidana korupsi dalam penegakan hukum?</p>

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersumber pada data yang berada di lapangan dengan cara melakukan wawancara dan observasi dengan menggunakan beberapa metode tertentu. Adapun metode yang digunakan adalah:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis sosiologis yakni melihat hukum yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dengan dikaitkan pada teori hukum serta dengan melihat kenyataan yang ada dalam masyarakat.⁵ Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Dengan menggunakan metode ini, data yang diperoleh di lapangan akan dibandingkan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori – teori hukum yang ada guna memperoleh jawaban yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi tempat dilakukannya penelitian adalah Kejaksaan Negeri Kota Batu yang beralamatkan di Jalan Sultan Agung Sisir No. 7 Kota Batu, Jawa Timur.

⁵ Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika, 2002.

3. Jenis Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan agar penulis mendapatkan data yang akurat dan relevan. Adapun data yang diperoleh menggunakan cara sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dengan melakukan wawancara. Penulis melakukan wawancara secara langsung kepada Jaksa Fungsional Intelijen dan Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Kota Batu dan observasi yang berkaitan dengan intelijen di Kejaksaan Negeri Kota Batu dalam menangani perkara penting.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti naskah akademis, buku-buku, jurnal, media online, media cetak, hasil penelitian skripsi maupun tesis yang telah dilakukan sebelumnya, hasil karya dari kalangan hukum, dan sebagainya yang bisa menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian. Sumber data yang terkait adalah:

- 1) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- 2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara

- 3) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
- 4) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana
- 5) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
- 6) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-037/A/J.A/9/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia
- 7) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia
- 8) Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-135/A/JA/05/2019 Tentang Format /Bentuk, Kode, Dan Cara Pengisian Administrasi Intelijen Kejaksaan
- 9) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER -036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (Sop) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum
- 10) INSJA Nomor: INS-004M.A/3/1994 Tanggal 9 Matet 1994, Tentang Pengendalian Perkara Penting Tindak Pidana Umum

c. Data Tersier

Data tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah data – data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum,

ensiklopedia, dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Penentuan Informan

Penentuan informan sangat berpengaruh terhadap data yang akan didapatkan untuk penelitian ini, maka dari itu penulis menentukan perolehan data untuk penelitian ini bersumber dari Trisnaulan Arisanti, S.H selaku Jaksa Fungsional Bidang Intelijen dan Maharani Indrianingtyas, S.H selaku Jaksa Fungsional Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Kota Batu.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan daftar isian/pertanyaan. Isi dari daftar pertanyaan ini memuat pertanyaan – pertanyaan yang terlebih dahulu disistematiskan dan diuji coba sebelum disampaikan kepada responden. Sebelum dilaksanakan pengiriman pertanyaan, penulis melakukan survei dan pengamatan terhadap para responden melalui sebuah diskusi. Daftar pertanyaan dan wawancara yang dilakukan dalam pelaksanaan penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang lebih spesifik.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah proses pengumpulan data melalui penelusuran kepustakaan berupa literatur untuk menemukan data yang diperlukan selama penelitian ini berlangsung.

c. Studi Penelusuran Internet

Studi penelusuran internet adalah proses pengumpulan data melalui bantuan jaringan internet untuk menemukan data yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

d. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi dapat diketahui oleh pihak tertentu.

6. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh dalam penelitian ini, baik primer maupun sekunder dianalisa dengan cara analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisa ini merupakan suatu cara mendeskripsikan dan menganalisa secara aktual, sistematis, dan akurat mengenai data yang diteliti, yang telah diperoleh di lapangan berupa (kalimat-kalimat dan juga perilaku) yang kemudian menampilkan gambaran objektif dari hasil penulisan berdasarkan kenyataan.⁶ Adapun langkah-langkah yang dibutuhkan dalam analisa ini adalah mengumpulkan berbagai data, baik dari observasi, wawancara maupun dokumentasi. Kemudian melakukan

⁶ Jemadu, Aleksius (ed) *Praktek-praktek Intelijen dan Pengawasan Demokratis-Pandangan Praktisi*, DCAF-FES SSR Volume 2, Jakarta, 2007.

reduksi data yaitu merangkum dari hasil data lapangan tersebut dan melakukan seleksi terhadap apa yang akan dikaji dalam permasalahan.

H. Sistematika Penulisan

Berdasarkan sistematika, penulisan ini akan diuraikan dalam 4 (empat) bab, yaitu:

- Bab I Bagian awal dari penelitian yang berisi pengantar, pendahuluan, judul, latar belakang permasalahan, rumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II Tinjauan pustaka yang berisi paparan tentang kerangka teori yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas.
- Bab III Pembahasan yang menggambarkan tentang hasil penelitian, sehubungan dengan permasalahan hukum yang diangkat.
- Bab IV Bagian akhir dari penelitian yang berisi terkait kesimpulan dan saran yang dapat digunakan oleh masyarakat dan praktisi hukum.